

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual menjadi tonggak penting dalam reformasi akuntansi publik karena memungkinkan pengakuan pendapatan dan belanja tidak hanya berdasarkan kas, tetapi juga pada saat hak dan kewajiban timbul. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (Mardiasmo, 2018).

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual penting dalam reformasi akuntansi publik karena memungkinkan pengakuan pendapatan dan belanja tidak hanya berdasarkan kas, tetapi juga pada saat hak dan kewajiban timbul. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks daerah, penerapan SAP berbasis akrual menjadi tantangan tersendiri, termasuk di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, namun masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap pencatatan akrual, keterbatasan tenaga akuntansi (Wulandari, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP akrual sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan aparatur. Walaupun BKPSDM bukan lembaga keuangan daerah seperti BPKAD, instansi ini tetap diwajibkan menerapkan SAP akrual dalam setiap proses administrasi keuangannya. Hal ini menjadikan kompetensi pegawai BKPSDM sebagai aspek strategis dalam mendukung implementasi SAP secara efektif dan akuntabel.

Dari sisi ilmiah, penelitian ini memiliki urgensi akademik karena masih terbatasnya kajian yang meneliti kompetensi pegawai pada lembaga non-keuangan seperti BKPSDM dalam konteks penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada instansi keuangan daerah (misalnya BPKAD dan BPKP), sedangkan dimensi kompetensi pegawai administratif di lembaga pengelola SDM belum banyak dieksplorasi. Celah penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana kompetensi pegawai BKPSDM berkontribusi dalam penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan kerja.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Bupati Cirebon, 2025). Penerapan sistem ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek kas, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah secara keseluruhan.

BKPSDM Kabupaten Cirebon sebagai lembaga pengelola sumber daya manusia memiliki peran penting dalam memastikan pegawainya memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan sistem akuntansi berbasis akrual. Meskipun program pelatihan dan pengembangan kompetensi telah dilakukan, di lapangan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan teknis pegawai (Permana & Widnyani, 2020).

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan dan pembinaan aparatur, BKPSDM tidak hanya berperan sebagai pengguna anggaran, tetapi juga sebagai pengelola kompetensi pegawai daerah. Oleh karena itu, kompetensi pegawai BKPSDM menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan memahami prinsip akuntansi, penguasaan sistem informasi keuangan, serta penerapan etika dan tanggung jawab akuntansi publik (Widodo, 2025).

Dukungan sistem informasi dan infrastruktur pengelolaan keuangan yang terpadu di BKPSDM Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya efektif untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prinsip akrual. Hambatan teknis ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak lengkap, sehingga perlu adanya sinergi antara peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan penggunaan teknologi informasi yang tepat (Kemenkeu, 2025).

Penelitian sebelumnya berfokus pada BPKAD dan lembaga keuangan daerah, namun belum ada yang meneliti secara khusus kompetensi pegawai BKPSDM sebagai instansi non-keuangan yang juga wajib menerapkan SAP berbasis akrual. Menekankan perlunya penelitian mendalam mengenai cara kompetensi pegawai bisa dikembangkan secara efisien di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Penelitian empiris yang lebih bersifat kontekstual dan kualitatif sangat diperlukan untuk memahami tantangan yang dihadapi pegawai di lapangan serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut (Adhitya, 2023).

Studi sebelumnya banyak menekankan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara luas dan makro (Permana & Widnyani, 2020). Penelitian sebelumnya belum melakukan analisis menyeluruh tentang masalah ini (Adhitya, 2023).

Kemampuan SDM sangat memengaruhi penggunaan SAP berbasis akrual (Indrawati, 2018; Risqi Sepputra, 2019). Namun, penelitian sebelumnya sebagian besar bersifat makro dan berkonsentrasi pada instansi keuangan daerah, atau badan pengelola keuangan daerah secara keseluruhan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa reformasi akuntansi publik di tingkat daerah benar-benar diinternalisasi melalui peningkatan kemampuan aparatur dan bukan hanya pada aspek regulatif. (Adhitya, 2023; Widodo, 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kompetensi pegawai dalam meningkatkan efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Metode ini tepat untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan tantangan pegawai dalam konteks tertentu (Sugiyono, 2019).

Perlunya penelitian kualitatif yang meneliti pengalaman pegawai BKPSDM dalam mengimplementasi SAP akrual. Metode ini sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-teknis seperti budaya organisasi, dan pandangan pegawai yang selama ini sering diabaikan dalam penelitian kuantitatif (Prasetyo, 2025). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam merumuskan strategi peningkatan kompetensi pegawai secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel merupakan bagian dari pelaksanaan amanah sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". Prinsip amanah ini menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah yang mengelola keuangan daerah berkewajiban menjalankan tugasnya dengan jujur, cermat, dan sesuai standar yang berlaku. Kompetensi pegawai dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis

akrual, dengan demikian, tidak sekadar tuntutan teknis-administratif, melainkan juga merupakan manifestasi nilai keadilan ('adalah), kejujuran (amanah), dan tanggung jawab (mas'uliyah) yang menjadi pilar utama ekonomi Islam dalam tata kelola keuangan publik (Harahap, 2016; Anto, 2003). Dalam konteks ini, kesenjangan kompetensi yang ditemukan di BKPSDM Kabupaten Cirebon—terutama minimnya pelatihan bersertifikat dan belum diterapkannya SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 secara formal—tidak hanya berdampak pada kualitas teknis pelaporan keuangan, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan amanah pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka nilai-nilai Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dirumuskan berdasarkan permasalahan utama yang terjadi terkait implementasi kompetensi pegawai dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon, dirancang untuk memberikan fokus yang jelas dalam penelitian.

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata pelaksanaan kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrual yang memerlukan keterampilan teknis dan manajerial tertentu.
- 2) Mengidentifikasi pelaksanaan kompetensi pegawai dalam penerapan SAP yang berbasis akrual. Mengeksplorasi bagaimana pandangan pegawai terhadap peran kompetensi yang mereka miliki dalam mendukung keberhasilan implementasi SAP yang berbasis akrual.

2. Batasan Masalah

Studi ini difokuskan pada pelaksanaan kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Cirebon yang berkontribusi langsung dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. Studi ini berfokus pada pengembangan, pelaksanaan

kompetensi pegawai yang berdampak pada efektivitas penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Efektivitas penerapan SAP berbasis akrual dalam penelitian ini dibatasi pada indikator seperti tingkat pemahaman pegawai terhadap SAP berbasis akrual, ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas diukur melalui indikator seperti pemahaman pegawai terhadap SAP berbasis akrual, ketepatan dan kualitas penyusunan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta kelancaran proses pelaporan keuangan.

Studi ini tidak mencakup implementasi SAP di unit atau instansi pemerintah lainnya, sehingga cakupannya terbatas pada BKPSDM saja. Di samping itu, perhatian pegawai hanya terpusat pada mereka yang secara aktif terlibat dalam pelatihan serta pelaporan keuangan berbasis akrual, tidak melibatkan pegawai di luar BKPSDM.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dalam penelitian ini difokuskan pada kompetensi sumber daya manusia, aspek teknis, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon.

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan kompetensi pegawai di BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon.
- 2) Mengidentifikasi kompetensi pegawai di BKPSDM dalam penerapan SAP berbasis akrual, termasuk aspek internal organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja.
- 3) Mengetahui efektivitas pegawai BKPSDM terhadap peran kompetensi yang mereka miliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SAP berbasis akrual dan partisipasi mereka dalam proses pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam mendukung kompetensi pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan penelitian (skripsi).
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan akuntansi publik, khususnya mengenai hubungan antara pengembangan kompetensi pegawai dan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual di pemerintahan daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan mengenai penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, dalam rangka mendukung kompetensi pegawai pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu/*Literature Review*

Menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Erina Sudaryati, Toton Da'i Permana (2020)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	kualitatif	Penelitian ini berfokus pada analisis teknis penerapan SAP berbasis akrual di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan meninjau aspek laporan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Penelitian ini tidak menyoroti pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kompetensi pegawai.
2.	Nikko Prasetya, Indrayeni (2021)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana penerapan SAP akrual di Dinas Pariwisata Kota Solok mampu

		Berbasis Akrua l pada Dinas Pariwisata Kota Solok		meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan jaringan.
3.	Septian Asriadi Putra, Rara Juniar Varina (2021)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	Kualitatif Deskriptif	lebih menekankan pada efektivitas implementasi SAP berbasis akrua di BPKAD Kota Bengkulu yang telah sesuai dengan regulasi, tetapi masih memerlukan peningkatan kompetensi dan jumlah aparatur pengelola keuangan di setiap OPD.
4.	Larasati (2022)	Peran Kepemimpinan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	Kualitatif	Penelitian ini menyoroti peran Bangkom dan Manajemen Talenta ASN, yang tidak dianalisis di penelitian terdahulu. Fokus pada akuntabilitas dan efisiensi melengkapi kualitas laporan, berbeda dari fokus kepemimpinan.
5.	Praisya Mumu, Lintje Kalangi,	Analisis Penerapan Standar Akuntansi	Kualitatif Deskriptif	berfokus pada penerapan SAP di Kecamatan Langowan Barat yang dinilai telah meningkatkan

	Peter M. Kapojos (2023)	Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa		transparansi dan akurasi laporan keuangan, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan kompetensi pegawai dan dukungan teknologi informasi.
6.	Anita Sari, Kusmilawaty (2023)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI untuk Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas	Kualitatif	Penelitian memusatkan perhatian pada tingkat pemahaman pegawai terhadap SAP akruaI serta peran teknologi sistem informasi (FMIS-SIMDA) dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan hambatan utama pada keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi.
7.	SB Siahaan (2023)	<i>Analysis of Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (Case Study in Labuhan Batu District BPKAD)</i>	Kualitatif Studi kasus	Studi kasus yang mengangkat proses implementasi di tingkat daerah, termasuk bagaimana pegawai menginterpretasi regulasi dan melaksanakan akuntansi berbasis akruaI.

8.	Marja Sinurat dkk (2023)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	menyoroti kesesuaian penerapan SAP akrual dengan ketentuan peraturan di Kabupaten Labuhanbatu serta pentingnya penyusunan SOP dan peningkatan kompetensi aparatur agar proses penyusunan laporan keuangan lebih efektif, relevan, dan tepat waktu.
9.	Youdhi Prayogo dkk (2023)	Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitatif Deskriptif	Penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan pimpinan, serta untuk mengidentifikasi kendala implementasi SAP akrual dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.
10.	R. Suzitra	Penerapan	Kualitatif	Membahas bagaimana

	(2024)	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan BMN	Deskriptif	penerapan SAP berbasis akrual dilakukan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan yang harus dicatat serta dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual.
--	--------	--	------------	--

E. Kerangka Pemikiran

Dalam akuntansi terdapat suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam melaksanakan teknik-tekniknya. Kerangka konseptual terdiri atas standar (teknik, prinsip) praktik yang sudah diterima secara umum dikarenakan manfaat dan kelogisannya, standar tersebut kemudian disebut dengan standar akuntansi.

Mardiasmo (2018) dalam Akuntansi Sektor Publik menekankan bahwa suksesnya pelaksanaan SAP yang akrual didapat dari sinergi antara faktor manusia (SDM), sistem (teknologi informasi dan prosedur), serta kondisi organisasi (budaya dan kebijakan). Apabila salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka meskipun terdapat kompetensi SDM yang tinggi, hal itu tidak akan menjamin efektivitas dalam pelaksanaan standar akuntansi berbasis akrual.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi pengambilan keputusan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP berbasis akrual mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat mereka terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang

lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 7).

Sistem dan peraturan yang berlaku serta keterampilan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah sangat memengaruhi penggunaan SAP berbasis akrual. Menurut Spencer & Spencer (1993), kompetensi karyawan adalah atribut yang mendasar yang terkait dengan seberapa baik seseorang berhasil dalam pekerjaannya. Keterlibatan ini terdiri dari tiga komponen utama: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

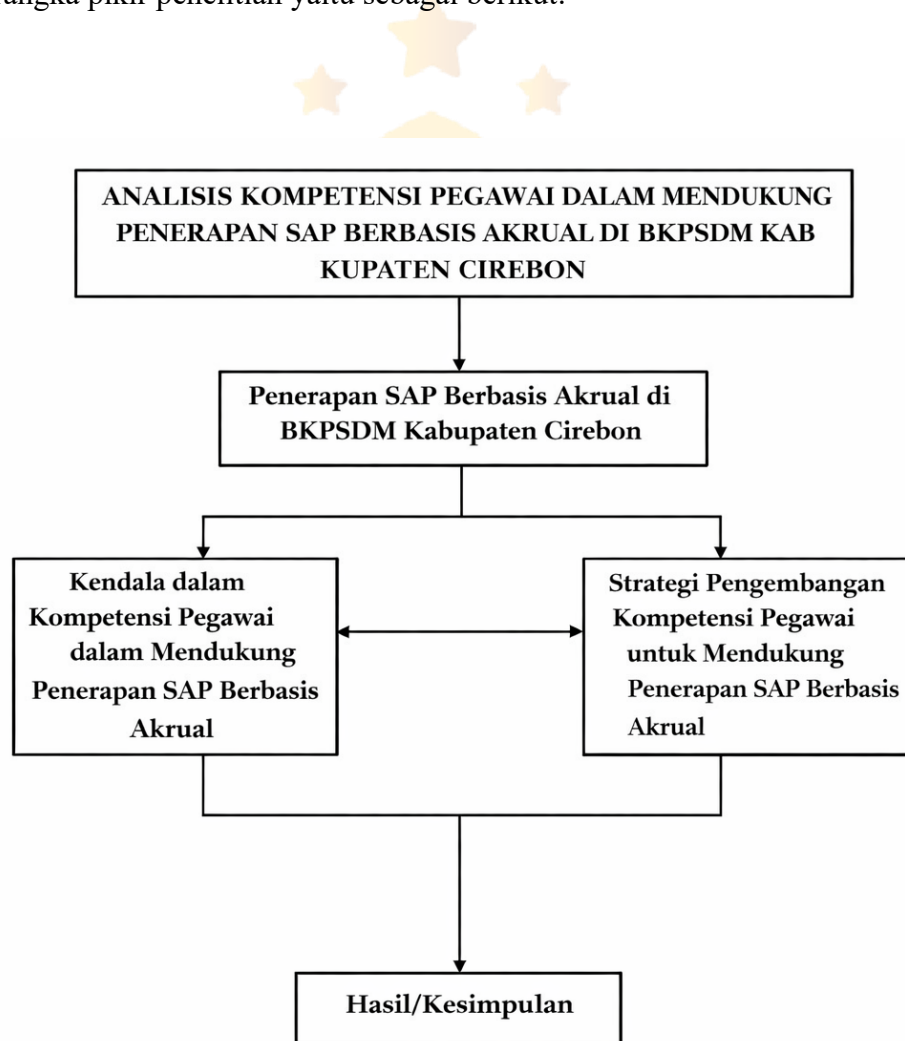
Semua komponen ini berdampak pada seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya secara profesional. Untuk menggunakan SAP berbasis akrual, pegawai harus memahami konsep dasar akuntansi berbasis akrual, peraturan dan peraturan yang berlaku, serta sistem akuntansi pemerintah. Kemampuan teknis termasuk kemampuan untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual, mengelola sistem akuntansi, dan menganalisis laporan keuangan. Sebaliknya, sikap menunjukkan tingkat komitmen, kejujuran, dan kesiapan karyawan untuk mengalami pergeseran sistem akuntansi dari basis kas ke basis akrual (Wibowo, 2016).

Namun, banyak tantangan tetap ada saat menggunakan SAP berbasis akrual dalam kehidupan nyata. Beberapa di antaranya adalah pegawai tidak memahami sistem dan tidak memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan, dan tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi kemampuan karyawan untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual: kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta ketersediaan sarana pendukung yang terbatas (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pegawai yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap memiliki peran penting dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Sebaliknya, untuk meningkatkan kemampuan karyawan, diperlukan pendekatan pengembangan yang tepat karena berbagai kendala mempengaruhi kompetensi tersebut. Pada akhirnya, rangkaian ini akan menentukan seberapa baik kemampuan pegawai untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun sebuah kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Konseptual

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai fenomena penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada BKPSDM Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang menekankan eksplorasi proses, makna, dan konteks sosial yang membentuk praktik akuntansi pemerintahan, tanpa manipulasi variabel seperti pada penelitian kuantitatif (Creswell, 2014).

Metode deskriptif memungkinkan peneliti mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan SAP berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pemaknaan para informan yang terkait (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memaparkan data dalam bentuk kata-kata, gambaran, dan fakta-fakta yang didapatkan langsung dari objek penelitian tanpa melakukan manipulasi variabel.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, yang merupakan unit kerja pemerintahan daerah dengan fungsi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelaporan keuangan daerah. Pemilihan BKPSDM sebagai objek penelitian didasarkan pada pentingnya peran institusi ini dalam mengimplementasikan SAP guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu selama tiga bulan, mulai Januari hingga Maret 2026 melalui berbagai teknik pengumpulan data.

b. Waktu penelitian

Waktu Penelitian akan dilakukan selama tiga bulan. Rentang waktu ini dipilih agar memungkinkan pengumpulan data yang mendalam melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2024) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," waktu penelitian dalam penelitian kualitatif biasanya berlangsung cukup lama untuk memperoleh data yang kaya dan komprehensif, sehingga rentang tiga bulan ini sangat sesuai untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif seperti ini.

Dengan waktu penelitian yang direncanakan selama tiga bulan, peneliti dapat secara optimal memproses pengumpulan, analisis, dan verifikasi data sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata di BKPSDM Kabupaten Cirebon secara menyeluruh dan terpercaya.

c. Objek Penelitian

BKPSDM Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam manajemen kepegawaian daerah sekaligus sebagai entitas akuntansi yang wajib menerapkan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangannya. Selain bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan realisasi belanja pegawai, BKPSDM juga memiliki tanggung jawab administratif dalam memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam penerapan SAP berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Subjek dipilih secara sengaja

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2024: 228). Subjek penelitian dalam studi ini terdiri atas:

1. Kepala Subbagian Keuangan, yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi pelaksanaan sistem akuntansi dan memastikan kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis akuntansi pemerintahan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan
3. Staf bagian keuangan dan akuntansi, yang melaksanakan kegiatan operasional terkait entri data, verifikasi dokumen, serta penyusunan jurnal dan laporan keuangan berbasis akrual
4. Kepala BKPSDM dan pejabat struktural lainnya, yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan pengendali internal dalam memastikan penerapan SAP berjalan efektif serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berorientasi pada penggambaran dan pemahaman mendalam terhadap fenomena penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada BKPSDM Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengungkap situasi dan kondisi nyata secara sistematis, faktual, dan kontekstual tanpa adanya manipulasi variabel oleh peneliti (Sugiyono, 2024).

Sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2020), metode ini sangat tepat untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks dengan model analisis induktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini memungkinkan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data sehingga interaksi langsung dengan objek penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan kaya akan makna. Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai untuk penelitian yang bersifat observasional dan eksploratif

4. Sumber Data

1) Data primer

Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang terdiri dari pejabat BKPSDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan melalui Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan SAP (Sugiyono, 2024).

2) Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen relevan, meliputi laporan keuangan daerah yang disusun sesuai SAP berbasis akrual, pedoman pelaksanaan SAP terbaru, peraturan daerah dan regulasi yang relevan, serta dokumen administrasi pendukung lainnya. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan landasan formal serta gambaran sistematis mengenai pelaksanaan SAP di instansi yang diteliti. Integrasi data primer dan sekunder memperkuat hasil penelitian dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mencerminkan keadaan aktual dalam BKPSDM (Simangunsong, 2016; Matutina, 2020).

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan berbagai teknik yang saling melengkapi, guna memperoleh gambaran yang utuh, mendalam, dan akurat mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.

1) Wawancara semi terstruktur

Dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya namun memungkinkan adanya pertanyaan tambahan demi eksplorasi lebih dalam selama wawancara berlangsung. Teknik ini sangat efektif untuk menggali pengalaman dan persepsi narasumber secara mendalam dan fleksibel. (Sugiyono, 2024: 227).

2) Observasi Partisipatif

Peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan kerja BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk mengamati proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat memahami secara kontekstual, memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih alami, factual, dan mendalam mengenai perilaku, kebiasaan kerja. (Sugiyono, 2024: 232).

3) Studi Dokumentasi

Sumber data sekunder yang krusial dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dan alat triangulasi data. Dokumen-dokumen resmi seperti laporan, regulasi, dan notulen rapat memberikan dasar analisis yang kuat dan meningkatkan kredibilitas penelitian. (Miles, Huberman, & Saldaña 2020: 69)

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, dimulai sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Data hasil wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi difokuskan serta disederhanakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan focus penelitian. Menurut deMarrais, Roulston, dan Copple (2024), reduksi data proses menyaring informasi agar menghasilkan makna substantive yang sesuai dengan konteks social

yang diteliti.

2) Penyajian Data (Data Display)

Agar hubungan antar fenomena dapat dilihat secara sistematis, data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk matriks, tabel, atau uraian naratif. Penyajian data membantu peneliti memahami cara SAP digunakan di BKPSDM. Hurst (2023) menyatakan bahwa penyajian data kualitatif yang baik harus dapat menggambarkan realitas sosial sesuai dengan pemahaman subjek penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, tahap akhir analisis dilakukan dengan menafsirkan pola dan hubungan dalam data. Hingga hasil akhir yang dapat dipercaya dan konsisten, kesimpulan awal diuji secara konsisten melalui triangulasi data. Proses ini bersifat reflektif dan berulang, di mana peneliti secara aktif membangun pemahaman teoretis mereka berdasarkan data empiris yang mereka peroleh, menurut Silver & Woolf (2023).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terfokus mengenai keseluruhan isi penelitian, dan memperjelas arah pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu/*Literature Review*, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menguraikan teori-teori terkait pengertian akuntansi, pengertian akuntansi berbasis akrual, pengertian akuntansi pemerintahan, pengertian standar akuntansi pemerintahan, pengertian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kerangka konseptual SAP berbasis akrual, serta kelebihan dan kekurangan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mencakup uraian mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi paparan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, mencakup gambaran umum BKPSDM Kabupaten Cirebon, deskripsi kompetensi pegawai, serta pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan instansi tersebut. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dibahas dengan mengaitkan temuan empiris dan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan SAP akrual.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait.